



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penggunaan Aplikasi Smart Village Literasia Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kualitas Pelayanan Administrasi Di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat

Syaibullah Safi'i¹

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia, syaibullahsafii2001@gmail.com

Corresponding Author: syaibullahsafii2001@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to examine the implementation of the Smart Village Literacy Application in enhancing administrative services for the community in Nagari Sungai Aua, Sungai Aur District, West Pasaman Regency. The study employs a simple research design (SRD) approach, where the researcher reflects on field findings using David C. Korten's Conformity Model theory. The findings indicate that the application's implementation in improving administrative service efficiency and quality can be assessed through three suitability variables: 1. Alignment between the program and user group, 2. Alignment between the program and implementing organization, and 3. Compatibility between the implementing organization and user groups. Based on the established indicators, none of the three variables showed alignment, indicating that the Smart Village Literacy Application has not been properly implemented.*

Keyword: *Implementation, Program, Conformity*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi aplikasi Smart Village Literasia dalam meningkatkan layanan administrasi di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah simple research design (SRD), di mana peneliti berusaha merefleksikan temuan lapangan dengan menggunakan teori Model Kesesuaian David C. Korten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi Smart Village Literasia dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan administrasi di Nagari Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan melalui tiga variabel kesesuaian: 1. Kesesuaian antara program dan kelompok pengguna, 2. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, serta 3. Kesesuaian antara organisasi pelaksana dan kelompok pengguna. Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, tidak ditemukan kesesuaian pada ketiga variabel tersebut, sehingga Aplikasi Smart Village Literasia belum diimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Kesesuaian.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi internet dalam pemerintahan dikenal sebagai *electronic government* (*e-government*). Secara sederhana, *e-government* merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat dengan dukungan teknologi informasi. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Indonesia, *e-government* berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat secara lebih efektif. Namun, penerapannya menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Di negara maju, *e-government* telah membawa berbagai inovasi dan efisiensi dalam proses administrasi dan layanan publik. Sebaliknya, di negara berkembang seperti Indonesia, hasilnya masih memprihatinkan. Banyak lembaga pemerintah menghadapi hambatan atau gagal mencapai peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik meskipun teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia sudah memadai (Sudarsono & Lestari, 2018).

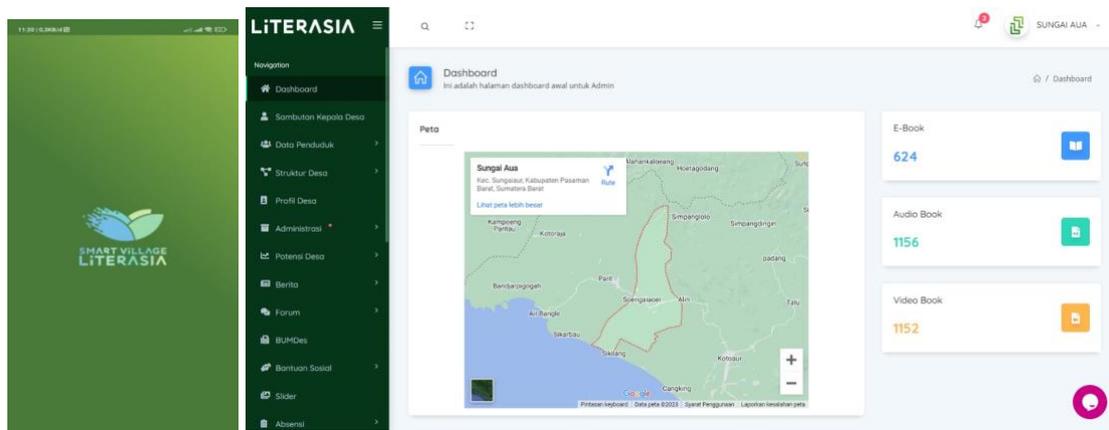
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, diperlukan sistem pelayanan administrasi yang mudah dan cepat dengan menerapkan digitalisasi layanan administrasi. Digitalisasi ini menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan administrasi di desa (Anita & Astuti, 2022). Digitalisasi berarti menerapkan sistem digital, dan penerapannya dalam administrasi desa diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi yang baik akan mencerminkan kinerja pemerintah desa yang berkualitas.

Salah satu contoh penerapan *e-government* adalah penggunaan aplikasi Web OpenSID di daerah Padang Panjang, yang telah diteliti dalam studi berjudul **E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang** (Jalma & Putera, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Web OpenSID dalam meningkatkan layanan publik berjalan dengan baik, terutama dilihat dari analisis dimensi sektor publik. Web OpenSID menyajikan berbagai informasi yang dikelola dengan baik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi nagari, proses layanan publik, serta menyelesaikan layanan publik lebih cepat karena data populasi sudah tersimpan di server OpenSID. Namun, penggunaannya belum optimal, disebabkan oleh beberapa konten yang tidak diperbarui dan beberapa informasi yang masih belum tersedia.

Terkait pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pedesaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan daerah merupakan salah satu prioritas pembangunan pedesaan. Di era modernisasi, pemerintah desa diharapkan melakukan inovasi dalam memberikan layanan publik, karena pelayanan publik adalah dasar utama interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 dan 21 Tahun 2020 tentang prioritas dana desa menekankan pentingnya program desa digital. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan. Sebagai unit administratif terkecil, desa harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan data kependudukan (Asyikin et al., 2015).

Untuk menjawab permasalahan ini, banyak desa di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan sistem informasi digital, atau yang dikenal sebagai *e-Government*, dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah Nagari Sungai Aua di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi, Nagari Sungai Aua memutuskan untuk mengadopsi aplikasi Smart Village Literasia. Aplikasi ini, yang diluncurkan dan disahkan pada 30 November 2022, masih tergolong baru. Smart Village Literasia dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan administrasi desa atau nagari, dengan fokus pada peningkatan literasi digital dan efisiensi

proses administratif. Diharapkan, aplikasi ini dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi nagari (Nagari Sungai Aua [Rabu, 30 November 2022]).



Gambar 1. Aplikasi Smart Village Literasia dapat diakses melalui tautan berikut: <https://apkcombo.com/id/smart-village-literasia/com.literasia.desa/>.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh Nagari Sungai Aua meliputi pengelolaan data penduduk, manajemen keuangan nagari, pengelolaan aset daerah, serta pelaporan dan transparansi informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, sumber daya manusia atau perangkat Nagari Sungai Aua masih belum memadai, terutama dalam menyesuaikan diri dengan era digitalisasi yang dapat mempermudah penyelesaian pekerjaan. Masih terdapat perangkat nagari yang belum mampu mengoperasikan alat bantu, seperti komputer dan teknologi lainnya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Hayani et al., 2022). Selain itu, sebagai nagari yang baru dimekarkan, Nagari Sungai Aua menghadapi banyak tantangan terkait administrasi, seperti pengelolaan data penduduk dan peta wilayah yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Dengan implementasi Smart Village Literasia, diharapkan proses-proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan transparan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan administrasi, penulis melakukan penelitian mengenai aplikasi Smart Village Literasia di Nagari Sungai Aua dengan judul “Penggunaan Aplikasi Smart Village Literasia dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Administrasi di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Research Design (SRD), yang merupakan desain penelitian sederhana dalam paradigma postpositivisme. Disebut "sederhana" karena hanya melibatkan lima langkah penelitian. Penulis berusaha merefleksikan pengalaman lapangan saat melakukan penelitian sederhana dalam konteks postpositivisme, yaitu dengan memanfaatkan teori untuk menyelesaikan masalah di lapangan (Bungin, Burhan 2022).

Penelitian ini berfokus pada implementasi aplikasi Smart Village Literasia di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat Nagari Sungai Aua dan masyarakat setempat. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berfungsi sebagai data penunjang yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode Simple

Research Design (SRD) untuk menganalisis implementasi aplikasi Smart Village Literasia di Nagari Sungai Aua, dengan fokus pada pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis yang dilakukan dalam tiga tahap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Aplikasi Smart Village Literasia dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat

Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Ia menambahkan bahwa proses implementasi hanya akan dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan disusun, dan dana disiapkan serta dialokasikan untuk mencapai sasaran (Entjaurau et al., 2021). Sementara itu, Jones menyebutkan bahwa program adalah salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program diartikan sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan program itu sendiri (Jumono & Hayati, 2021).

Berdasarkan salah satu model implementasi program yang dikembangkan oleh David C. Korten, terdapat tiga unsur kesesuaian yang penulis gunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan aplikasi Smart Village Literasia untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan administrasi di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut penulis akan mengemukakan satu per satu:

Kesesuaian antara Program dengan Pemanfaat

Berdasarkan pola yang dikembangkan oleh Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan mencapai hasil yang diharapkan jika tidak ada kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka output tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan. Selain itu, jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diperlukan, maka organisasi tersebut tidak akan mampu menyampaikan output program dengan tepat. Jika syarat yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak akan mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan sangat penting agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dalam unsur pertama, David C. Korten menekankan bahwa dalam suatu program harus terdapat kesesuaian antara program dan kelompok pemanfaat. Ini berarti bahwa program harus selaras dengan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok pemanfaat, yang dapat dilihat dari adanya latar belakang yang jelas dan anggaran yang memadai untuk memenuhi ketentuan dasar yang diperlukan. Untuk menentukan kesesuaian antara program dan kelompok pemanfaat, terdapat tiga indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah program. Jika ketiga indikator ini terpenuhi, maka akan ada kesesuaian antara program dan kelompok pemanfaat (Issn, 2022).

1. Adanya Latar Belakang dan Tujuan yang Jelas

Tujuan suatu program adalah dasar pembentukannya dan menjadi sasaran dari implementasi program tersebut. Tommy Suprpto mendefinisikan tujuan sebagai pencapaian misi tertentu yang dapat dicapai dalam waktu singkat, serta menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa depan. Berdasarkan temuan penelitian, aplikasi Smart Village Literasia memiliki latar belakang dan tujuan yang jelas. Pengadopsian aplikasi ini dilatarbelakangi oleh inisiatif pemerintah Nagari Sungai Aua untuk membawa desa ke era digital, menggantikan pelayanan manual yang memakan waktu lama dan mengharuskan masyarakat datang ke kantor nagari, sering kali dengan berkas yang tidak lengkap. Pada akhir tahun 2022, pemerintah Nagari mengadopsi aplikasi

ini sesuai saran tenaga ahli dan pendamping desa karena dianggap bermanfaat dengan banyak fitur.

Regulasi yang mendasari aplikasi ini adalah Permendes PDTT No 7 Tahun 2021, yang mencakup prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan desa digital, terutama dalam konteks pandemi Covid-19 dan tujuan SDGs Desa. SDGs Desa bertujuan untuk menciptakan desa tanpa kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merata, serta perhatian pada kesehatan, lingkungan, pendidikan, gender, jejaring, dan budaya. Tujuan diadopsinya aplikasi Smart Village Literasia adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kunjungan masyarakat ke kantor, dan mengurangi penggunaan kertas, mendukung pengembangan SDGs Desa. Tujuan ini juga dicantumkan dalam berita acara yang disusun oleh pemerintah Nagari Sungai Aua untuk transparansi informasi kepada masyarakat.

2. Adanya Kebijakan/Tindakan yang Diambil untuk Mencapai Tujuan

Kesesuaian antara program dan pemanfaat juga dapat dilihat dari kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut, baik melalui peraturan maupun tindakan yang diambil oleh organisasi pelaksana terhadap program. Kebijakan atau tindakan ini penting untuk mencapai hasil yang diharapkan, mengatasi masalah yang ada, dan memastikan konsistensi program. Berdasarkan temuan penelitian, Nagari Sungai Aua sebagai organisasi pelaksana belum menunjukkan upaya serius dalam mencapai tujuan aplikasi Smart Village Literasia. Kebijakan yang ada, yaitu Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, hanya mencakup pengembangan SDGs Desa, termasuk desa digital. Dalam pedoman pelaksanaannya, Permendes ini dapat dijadikan acuan oleh pemerintah nagari/desa untuk menggunakan dana desa sesuai prioritas.

Namun, regulasi ini hanya mengatur prioritas penggunaan dana desa dan tidak secara spesifik mengatur penggunaan aplikasi Smart Village Literasia. Tidak ada peraturan khusus mengenai aplikasi tersebut, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan lainnya. Pihak Nagari Sungai Aua juga menegaskan hal ini dalam wawancara dengan penulis. Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan hambatan dan mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, jika tidak ada kebijakan yang spesifik untuk suatu program, maka sulit untuk mewujudkan tujuan program tersebut.

Nagari Sungai Aua hingga saat ini belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai aplikasi Smart Village Literasia kepada masyarakat. Sosialisasi baru dilakukan untuk perangkat nagari, meskipun aplikasi ini telah diadopsi sejak tahun 2022. Dalam Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, dijelaskan bahwa desa/nagari wajib memberikan informasi secara terbuka mengenai program-program yang diambil dalam prioritas penggunaan dana desa. Selain itu, peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah desa/nagari harus mengadakan musyawarah dengan warga dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa.

Akibatnya, masyarakat Nagari Sungai Aua menjadi kurang memahami aplikasi Smart Village Literasia. Pemerintah Nagari beralasan bahwa aplikasi tersebut sedang dalam masa suspensi akibat masalah manajemen dari pihak ketiga. Saat ini, aplikasi tersebut belum bisa digunakan sejak Mei 2024. Pemerintah Nagari telah mencoba menghubungi pihak pengembang dan PT. Literasia Edutekno Digital, tetapi belum mendapatkan jawaban yang jelas. Mereka saat ini masih menunggu itikad baik dari pihak ketiga sebelum mempertimbangkan langkah hukum. Sosialisasi sangat penting untuk memperkenalkan program kepada masyarakat agar informasi mengenai program dapat disampaikan dengan jelas. Bahkan jika sosialisasi sudah dilakukan dengan baik, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami program tersebut (Andani et al., 2019).

3. Perkiraan Anggaran yang Diperlukan

Anggaran merupakan dana yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menjalankan program, sehingga dapat mendukung kegiatan secara finansial. Anggaran yang dirinci dengan baik dan mencukupi akan membantu organisasi mencapai tujuan program. Secara umum, anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk periode mendatang. Menurut Abdul Hafiz Tanjung, anggaran adalah pedoman untuk tindakan yang akan diambil oleh perusahaan atau organisasi sesuai dengan rencana pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang, disusun secara sistematis menurut klasifikasi tertentu untuk suatu periode (Caron & Markusen, 2016).

Perencanaan dan penganggaran adalah dua kegiatan yang saling terkait dan sangat penting dalam manajemen bisnis dan organisasi. Perencanaan berhubungan dengan pemikiran dan penetapan tujuan, sasaran, strategi, serta tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi dalam jangka panjang. Di sisi lain, penganggaran adalah proses penetapan alokasi dana atau sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam perencanaan (Kemenkes RI, 2019).

Dari segi anggaran program, Pemerintah Nagari telah memiliki penganggaran yang baik dan memadai. Pemerintah nagari telah mengeluarkan dana untuk pengadopsian aplikasi Smart Village Literasia sesuai dengan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 mengenai prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Pemerintah nagari mengalokasikan dana sebesar Rp 50.000.000, yang bersumber dari APB Nagari tahun 2022 dan berasal dari dana desa. Hal ini juga telah dicantumkan dalam RKP Nagari Sungai Aua tahun 2022 yang telah dibahas dalam musyawarah bersama seluruh pihak yang berwenang.

Anggaran ini juga tercantum dalam kontrak pembelian atau kerja sama mengenai aplikasi Smart Village Literasia dengan PT Literasia Edutekno Digital. Anggaran tersebut dialokasikan pada sub bidang pengembangan sistem informasi desa dan berlaku selama satu periode, yaitu lima tahun sejak tahun 2022. Pihak yang bertanggung jawab atas kontrak ini melibatkan pemerintah nagari, yang terdiri dari kepala urusan perencanaan, sekretaris nagari, dan wali nagari, serta pihak PT Literasia Edutekno Digital.

Pemerintah Nagari Sungai Aua juga telah mengelola dan mencatat dengan baik anggaran yang berkaitan dengan program ini, mulai dari dana yang masuk hingga dana yang dikeluarkan untuk kontrak pembelian aplikasi Smart Village Literasia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Nagari Sungai Aua memiliki penganggaran yang baik dalam menjalankan program aplikasi Smart Village Literasia.

Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana

Variabel kedua dalam pola yang dikembangkan oleh Korten adalah kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana. Ini berarti bahwa harus ada keselarasan antara tugas yang ditetapkan oleh program dan kemampuan organisasi yang melaksanakannya. Berdasarkan variabel ini, terdapat beberapa indikator yang perlu dipenuhi, yaitu:

1. Kognisi (pemahaman/pengetahuan)

Pemahaman merujuk pada kemampuan pelaksana dalam melaksanakan program yang ditugaskan kepada mereka, baik secara individu maupun sebagai organisasi. Istilah kognitif berasal dari kata kognisi (kata benda) dan mencakup beberapa makna, seperti proses memperoleh pengetahuan, usaha menggali pengetahuan melalui pengalaman pribadi, proses mengenali lingkungan oleh individu, dan hasil dari pencapaian pengetahuan (Izzuddin, 2021).

Pengetahuan atau kemampuan organisasi dalam melaksanakan perintah yang diatur oleh program sangat penting agar hasil dari program dapat disampaikan dengan baik. Seperti yang dinyatakan oleh Donald P. Warwick, kemampuan teknis dari organisasi

pelaksana adalah salah satu faktor pendorong keberhasilan implementasi program (Syahida, 2014).

Berdasarkan temuan penelitian, dalam seluruh proses pengadopsian aplikasi Smart Village Literasia, pemerintah nagari telah menjalankan semua langkah penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes PD TT No 7 Tahun 2021, mulai dari penyusunan, penetapan, hingga pelaporan. Namun, pemerintah nagari belum melibatkan masyarakat secara luas dalam penyusunan dan penetapan tersebut. Saat ini, pemerintah nagari masih berada pada tahap pelaporan, yang hanya mencakup laporan pendanaan. Padahal, Permendes PD TT No 7 Tahun 2021 menyebutkan pentingnya memberikan informasi secara terbuka tentang program yang dilaksanakan

Selain itu, Nagari Sungai Aua sebagai organisasi pelaksana sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai program aplikasi Smart Village Literasia. Ini didukung oleh pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh PT. Literasia Edutekno Digital kepada pemerintah nagari secara offline saat peluncuran aplikasi, serta pelatihan dan bimbingan online yang sesuai dengan kontrak pengadopsian aplikasi Smart Village Literasia.

2. Arah respon pelaksana terhadap implementasi, apakah menerima atau menolak.

Arah respon pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan implementasi suatu program. Meskipun pemahaman dan pengetahuan organisasi pelaksana sangat diperlukan, arah respon yang positif akan membuat kognisi tersebut lebih efektif dalam melaksanakan program. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Arah respon (disposisi) organisasi pelaksana sangatlah krusial. Keberhasilan implementasi program dapat diukur dari seberapa dalam para pelaksana menerima standar dan tujuan program, serta tanggung jawab mereka dalam menjalankan program tersebut (Kurniawan & Maani, 2020).

Berdasarkan temuan di lapangan, pemerintah nagari menyatakan menyambut baik aplikasi Smart Village Literasia, yang dianggap dapat mempermudah pelayanan administrasi di Nagari Sungai Aua. Namun, respons positif ini tidak terlihat oleh masyarakat setempat. Semua wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui tentang aplikasi Smart Village Literasia, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah nagari. Selain itu, pemerintah nagari masih menjalankan layanan administrasi secara manual tanpa memberitahukan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan aplikasi Smart Village Literasia.

Kesesuaian antara organisasi pelaksana dan kelompok pemanfaat

Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana dapat dilihat dari syarat yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana agar kelompok pemanfaat dapat memperoleh hasil dari program yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Korten (1988), penting adanya kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana untuk mencapai hasil program yang sesuai. Jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana, maka mereka tidak akan menerima hasil dari program tersebut. Oleh karena itu, kedua elemen ini harus saling mendukung agar pelaksana dan sasaran program dapat bersama-sama meraih manfaat.

Dari temuan peneliti di lapangan, syarat yang ditetapkan oleh pemerintah nagari Sungai Aua agar masyarakat bisa memperoleh hasil dari aplikasi Smart Village Literasia adalah membuat akun terlebih dahulu. Persyaratan untuk pendaftaran akun meliputi: nama lengkap, asal desa, kepala keluarga, jenis kelamin, username, nomor handphone, email, dan password. Di sisi lain, syarat untuk pengurusan surat menyurat, seperti data kependudukan dan surat izin, tetap sama seperti biasanya, namun kini sudah menggunakan sistem online dengan cara

mengunggah file gambar ke aplikasi Smart Village Literasia. Meskipun persyaratan tersebut terbilang mudah, banyak masyarakat yang belum memahami aplikasi ini. Dari hasil wawancara, mereka menyatakan masih melakukan pengurusan surat menyurat secara manual dengan datang ke kantor, dan tidak ada pemberitahuan atau bimbingan terkait aplikasi ini.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, kinerja program tidak akan berhasil sesuai harapan jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka output tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka output program tidak akan disampaikan dengan tepat. Demikian pula, jika syarat yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak akan mendapatkan output dari program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan sangat diperlukan agar program dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan aplikasi Smart Village Literasia di Nagari Sungai Aua, implementasinya tidak berjalan dengan baik sesuai dengan teori David C. Korten yang menekankan pentingnya kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Terdapat tiga kesimpulan utama:

1. Kesesuaian antara program dengan kelompok pemanfaat**: Meskipun tujuan program sesuai dengan kebutuhan kelompok pemanfaat dan perencanaan pendanaan telah terpenuhi, tindakan dan kebijakan dalam pencapaian tujuan belum dilakukan secara maksimal, sehingga kesesuaian masih kurang.
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana**: Organisasi pelaksana memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai terkait program, namun respon dari mereka terhadap program belum terlihat baik. Masyarakat mengaku tidak mendapatkan arahan atau pengenalan mengenai aplikasi, yang mengindikasikan kesesuaian yang kurang.
3. Kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan kelompok pemanfaat**: Meskipun persyaratan untuk mendaftar akun dapat dipenuhi oleh masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengakibatkan masyarakat tidak mendaftar. Ini menunjukkan tidak adanya timbal balik antara organisasi pelaksana dan kelompok pemanfaat.
4. Secara keseluruhan, aplikasi Smart Village Literasia di Nagari Sungai Aua belum memenuhi tiga unsur kesesuaian yang diperlukan, sehingga program tidak berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Asyikin, A. N., Fitri, R., & N, A. S. B. (2015). Masterplan Teknologi Informasi Dan Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 4.1. *Poros Teknik*, 7(2), 61–67.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Burhan Bungin. 2022. *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Cresswell, J. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Husni Thamrin. 2013. *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Itenas. 2019. *Konsep Dan Variabel Smart Village*. Konsep Dan Variabel Smart Village, 2010, 12–24.
- Iskandar Yahya Arulampalam, Kunaraj P.Chelvanathan, A. A. A. B. (2023). Implementasi Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di Kantor Kelurahan Page Sangan Kota Surabaya. *Journal of Engineering Research*, 3(03), 32–38.
- KBBI. 2001. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., Siswanto, A., Muzni Hanipah, Aryani, L., Rahmadanita, A., Dowa, P. P. C., & Nurhakim, M. R. S. (2022). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 46(2), 112–128.
- Martadala, D. A., Neneng, Susanto, E. R., & Ahmad, I. (2021). Model Desa Cerdas Dalam Pelayanan Administrasi (Studi Kasus: Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(2), 40–51.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurmadi, Achmad. 2014. *Manajemen Perkotaan (Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas)*. Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Jakarta (JKSGUMY): Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- R. Birtanto. 2010. *Desa Kota*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, B. G., & Lestari, S. P. (2018). Kajian Literatur Model Konseptual Keberhasilan E-Government. *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 2(1), 491–498. <https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.981>
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi Sektor Publik*. STIA-LAN Press: Jakarta.
- Utomo, Tri Widodo. 2016. *Inovasi Harga Mati: Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo: Depok.
- Permendes PDTT No.7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang desa
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- <https://nagarisungaiaur.pasamanbaratkab.go.id/page/Profil%20Nagari%20Sungai%20Aua>
- <https://www.gramedia.com/best-seller/efisiensi/>